

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang penerapan *E-Government* di Disnakertrans DIY, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *E-Government* sudah diterapkan dan pada tahap pengembangan website untuk meningkatkan layanan publik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penerapan berbagai layanan tentang ketenagakerjaan dan transmigrasi pada website *nakertrans.jogjaprovo.go.id* yang dikelola oleh Sub. Bagian Program di Kantor Disnakertrans DIY. Layanan tersebut meliputi: pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan bagi paramedis, pelatihan bagi dokter, pelatihan bagi teknisi, pengaduan pegawai, buku tamu, lowongan kerja, pengawasan, penempatan naker, program dan informasi, yang terakhir pelatihan dan sertifikasi.

Adapun temuan di lapangan berdasarkan wawancara serta observasi yang dilakukan, meliputi faktor pendukung dan penghambat antara lain:

A. Faktor Pendukung

- 1) Visi, Strategi, dan Kebijakan, terkait dengan *E-Government* di Disnakertrans DIY sudah ada dan berjalan mengikuti beberapa

Peraturan Gubernur DIY dan Peraturan Daerah DIY terkait teknologi informasi, hingga komitmen dari top management ke depannya dalam strategi pengembangan *E-Government*.

- 2) Strategi Arsitektur Perusahaan, dari segi arsitektur perusahaan sudah ada, yakni berwujud evaluasi dari berbagai pihak serta layanan *E-Government* yang tidak terpaku pada peraturan dalam artian menyesuaikan kondisi di lapangan.
- 3) Manajemen TI dan Organisasi, dari segi manajemen TI dan organisasi sudah terstruktur dengan baik, yakni sudah ada perencanaan TI yang mengikuti rambu kebijakan melalui RKPD dan struktur organisasi yang terlibat di dalamnya sudah jelas penanggung jawab utamanya
- 4) Arsitektur TI, kualitas dari segi arsitektur TI sudah baik, mulai dari standar keamanan yang digunakan hingga kerjasama dengan Kominfo dalam pengamanannya.
- 5) Portofolio dan Manajemen Risiko, dari segi portofolio dan manajemen resiko sudah berjalan berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY No. 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan melalui tahapan-tahapan.
- 6) Layanan TI, dari segi layanan TI sudah ada, mulai dari beberapa inovasi yang dikembangkan maupun melalui surat keputusan tentang perjanjian tingkat layanan yang dijadikan acuan. Layanan pengaduan

tenaga kerja dapat dilakukan secara online pada website Disnakertrans DIY yang dikembangkan pada tahun 2021. Kemudian banyak inovasi yang sedang direncanakan dan dikembangkan ke depannya misalnya: *link and match* (kebutuhan dan kesiapan tenaga kerja), lowongan kerja yang dimasukkan ke website, dan otomatisasi pertanyaan masyarakat sehingga langsung terhubung dengan bidang terkait.

- 7) Pemanfaatan Aset, dari segi pemanfaatan aset harus melalui mekanisme tersendiri yakni dengan menyusun RKBMD terlebih dulu pada setiap tahunnya dan tidak menjadi kendala yang berarti bagi Disnakertrans DIY.
- 8) Proses Bisnis Manajemen, dari segi proses bisnis manajemen sudah ada, yakni melalui proses bisnis manajemen khusus informasi dan proses bisnis manajemen organisasi.
- 9) Manajemen Kinerja, dari segi manajemen kinerja sudah baik, didukung dari mekanisme SKP per-triwulan dan penghitungan IKM berindikator A atau (Sangat Baik).
- 10) Kepatuhan, dari segi kepatuhan sudah ada dalam penerapannya, yakni mengikuti Peraturan Gubernur DIY No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan eksternal didukung dengan beberapa Peraturan Gubernur DIY lainnya dan Keputusan Kepala Dinas 560/00175 Tahun 2019 sebagai peraturan internal.

11) Jaminan Mutu dan Keamanan, dari segi jaminan mutu dan keamanan dalam bidang teknologi tidak lepas dari peran Kominfo pada penerapannya. Kondisi tersebut tidak serta merta diserahkan kepada Kominfo saja, tetapi pihak Disnakertrans DIY juga membuat sistem pemrograman yang terstruktur sehingga sulit di retas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

12) Manajemen Perubahan, dari segi manajemen perubahan sudah ada, dimulai dari rencana perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung *E-Government*, kemudian peningkatan kompetensi pegawai melalui program beasiswa S1 bidang teknologi. Sedangkan dari sisi perubahan struktur organisasi tetap harus mengikuti peraturan gubernur yang kemudian dapat disiasati dengan surat tugas lain dari SK Kepala Dinas.

13) Manajemen Pengetahuan, dari segi manajemen pengetahuan sudah berjalan lama, yakni berwujud *transfer knowledge* (diskusi), bimbingan teknis oleh Kominfo, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan Disnakertrans DIY terkait.

B. Faktor Penghambat

1) Layanan kepada Warga dan Bisnis, dari segi layanan kepada warga dan bisnis dinilai kurang maksimal, misalnya: masih kurang responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari masyarakat, kemudian masih terdapat menu dan sub-menu yang kosong saat dibuka seperti menu buku tamu, peluang kerja disabilitas, berita

pengarusutamaan gender, sub-menu program dan kegiatan, informasi setiap saat dan informasi serta merta dan selanjutnya informasi lowongan kerja masih terpusat di media sosial seperti facebook dan instagram, dimana masih menjadi rencana ke depan perihal lowongan kerja yang dimasukkan ke dalam layanan website.

- 2) **Interoperabilitas**, dari segi interoperabilitas belum ada, dalam artian belum memiliki fitur keterhubungan dengan website di lain instansi.
- 3) **Infratraktur dan Alat**, terkait dengan hardware yang digunakan sudah terbilang baik. Hanya saja dari software yang digunakan saat ini masih dalam tahap pengembangan menggunakan sistem wordpress sehingga harus melewati proses perbaikan-perbaikan agar menjadi website yang baik dari segi tampilan, kemanan, maupun kelengkapan fitur di dalamnya.
- 4) **Sumber Daya Manusia**, dari segi sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengoperasian *E-Government* sudah cukup baik karena sesuai dengan *background* keilmuan yang dimiliki. akan tetapi dari segi jumlah pegawai yang mengampu *E-Government* hanya berjumlah 2 orang, dengan rincian 1 (Satu) ASN dan 1 (Satu) tenaga bantu di Sub.Bagian Program. Kemudian layanan *E-Government* belum menjadi urusan utama, dalam artian belum ada pegawai yang khusus menangani *E-Government* saja dan masih menjadi pekerjaan kecil diantara tugas-tugas lain yang dilakukan pegawai.

Setelah mengidentifikasi dan mengelompokkan faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan *E-Government* di Disnakertrans DIY, untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan terkait layanan publik sebelum dan sesudah dari adanya penerapan *E-Government* di Disnakertrans DIY sebagai berikut:

Tabel 5.1 Layanan Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Government

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Layanan yang diberikan kepada masyarakat dan swasta harus melalui mekanisme datang langsung ke kantor sebelum adanya website.	Peningkatan layanan pengaduan tenaga kerja, pemagangan, pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan bagi para medis/dokter/teknisi, pengawasan, penempatan naker, serta layanan pelatihan dan sertifikasi dapat melalui media online atau website.
2.	Informasi terkait ketenagakerjaan hanya bisa diakses melalui media Koran atau media cetak, dan papan	Informasi terkait ketenagakerjaan bisa di akses dimanapun dan kapanpun selama 24 jam.

	informasi di Kantor Disnakertrans DIY yang tersedia pada hari dan jam kerja saja.	
3.	Hubungan pengguna dan penyelenggara layanan datang langsung atau tatap muka ke Kantor Disnakertrans DIY dalam mengurus administrasi dan lain-lain.	Memudahkan hubungan antara pengguna dan penyelenggara layanan ketenagakerjaan, yang dapat dilakukan melalui layanan website berbasis online.
4.	Akses layanan tersedia di Kantor Disnakertrans DIY dan di UPTD terkait.	Memperluas akses melalui jaringan internet, sehingga pelayanan tidak hanya tersedia di kantor layanan Disnakertrans DIY saja.

Jadi, dalam penerapan E-Government di Disnakertrans DIY dalam upaya peningkatan layanan publik, sudah mengubah transformasi hubungan antara pengguna dan penyelenggara layanan publik. Yang artinya, mengubah cara pandang layanan yang sebelumnya serba konvensional atau manual menjadi otomatis yang dapat dilakukan dan diakses secara mudah melalui media website, dimana tidak perlu tatap muka atau datang langsung ke Kantor Disnakertrans DIY. Selain itu layanan tersebut dapat tersedia selama 24 jam

non-stop yang sebelumnya hanya tersedia pada hari dan jam kerja saja. Layanan dan informasi yang diberikan dapat serta merta *up-to-date* pada waktu yang tertentu secara cepat sehingga memunculkan kemudahan bagi operator penyelenggara layanan publik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran yang terkait dengan penerapan *E-Government* khususnya dalam penerapan website di Disnakertrans DIY sebagai berikut:

- a. Dari layanan warga dan bisnis, mulai dari kelengkapan fitur disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan website dalam menyajikan data dan informasi kepada masyarakat mengenai lowongan kerja yang tersedia. Data dan informasi yang terintegrasi melalui website dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut, sehingga informasi lowongan kerja tidak hanya menggunakan media sosial tetapi didukung pada layanan website. Dari responsivitas disarankan menggunakan bantuan bot agar cepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kemudian dari segi fitur masih terjadi kekosongan isi pada menu-menu yang ada pada website tersebut sehingga perlunya untuk segera diisi sebagaimana mestinya.
- b. Dari interoperabilitas, untuk ke depannya dalam rencana jangka panjang sebaiknya tidak mengesampingkan interoperabilitas website guna menunjang keterhubungan sistem antar instansi pemerintahan.

- c. Dari insfatruktur dan alat, disarankan agar dapat *me-maintenance* (pemeliharaan) dan perbaikan website secara cepat dan tepat, karena pada pengembangannya mengubah sistem yang sebelumnya memakai *framework* codeigniter berubah menjadi wordpress sehingga perlunya *maintenance* dan perbaikan sistem dari segi tampilan, kamanan, maupun kelengkapan fitur di dalamnya.
- d. Dari sumber daya manusia, disarankan agar ada pegawai yang secara khusus menangani urusan *E-Government* saja, sehingga dengan begitu tidak ada lagi rangkap fungsi kerja dan dapat memaksimalkan peran *E-Government* menjadi urusan utama sebagai unsur layanan kepada masyarakat.

